

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian. Titik perhatian yang dimaksud seperti substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Daerah, Utang Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan untuk subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pajak daerah dan utang pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021. Gambaran umum objek penelitian dapat dijelaskan melalui kondisi geografis, kondisi demografis/kependudukan dan kondisi ekonomi.

3.1.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 105°48'' - 108°48'' Bujur Timur dan 5°50'' - 7°50'' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Banten
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Secara administratif, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota. Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 37.087,92 Km² dan Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat dengan luas 4.145,70 Km² (11,7%

terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Cirebon yaitu 37,36 Km² (0,11% terhadap luas Provinsi Jawa Barat). Wilayah Provinsi Jawa Barat terdiri atas 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa.

3.1.1.2 Kondisi Demografis

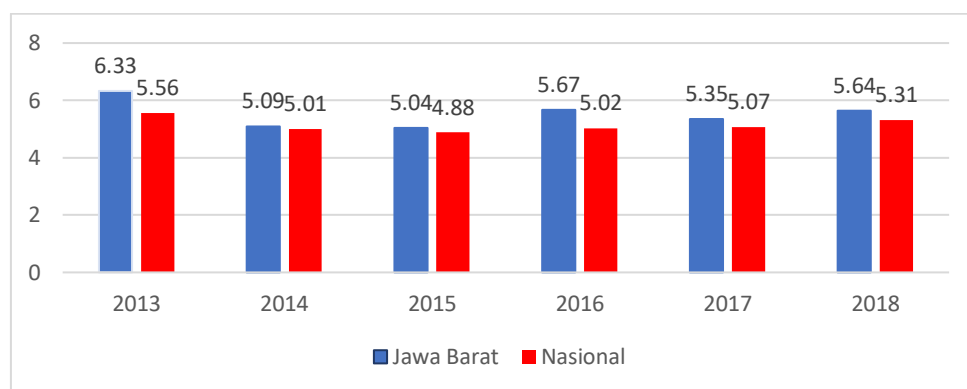
Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BPS dalam indikator statistik terkini Jawa Barat tahun 2019, jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2018 mencapai 48.683.861 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,34 persen. Penduduk terbanyak pada tahun 2018 berada di Kabupaten Bogor, sebanyak 5.840.907 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Bandung sebanyak 3.717.291 jiwa dan Kabupaten Bekasi sebanyak 3.630.907 jiwa. Sedangkan daerah yang paling sedikit penduduknya adalah Kota Banjar yaitu 182.819 jiwa.

Hampir 72,5 persen penduduk Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan sebagai akibat masuknya industri yang mendukung urbanisasi. Daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi dan Kota Bekasi menyumbang hampir sepertiga (31,64%) dari total penduduk Jawa Barat. Kepadatan penduduk di Jawa Barat terus meningkat, dari 1.320 jiwa per km² di tahun 2015 menjadi 1.339 jiwa per km² di tahun 2016. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di tahun tersebut, angka tertinggi berada di Kota Cimahi yaitu sebesar 15.127 orang per km², dan terendah di Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar 389 orang per km².

3.1.1.3 Kondisi Ekonomi

Gambaran umum kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Barat pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha industri Pengolahan, yaitu mencapai 42,29 persen. Selanjutnya disusul oleh perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,10 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Periklanan sebesar 8,60 persen; Konstruksi sebesar 8,26 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode 2013-2018 selalu lebih tinggi dari LPE Nasional, pola pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat hampir mirip sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami perlambatan, namun pada tahun-tahun berikutnya kembali meningkat. Posisi tahun 2017 dan 2018 menunjukkan LPE Jawa Barat lebih tinggi dari nasional yaitu masing-masing sebesar 5,35 dan 5,64 persen sementara LPE nasional masing-masing 5,07 persen dan 5,31 persen.



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar 3. 1

Laju Petumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018

Laju pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2013-2018 menunjukkan pencapaian yang variatif. Tahun 2017 terdapat Sembilan kabupaten/kota yang memiliki LPE lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) Kabupaten Sukabumi, (2) Kabupaten Garut, (3) Kabupaten Ciamis, (4) Kabupaten Cirebon, (5) Kabupaten Indramayu, (6) Kabupaten Subang, (7) Kabupaten Purwakarta, (8) Kabupaten Pangandaran, dan (9) Kota Banjar.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Nasution (2011: 1) merupakan metode dimana hipotesis yang dirumuskan setelah dikumpulkan data objektif secara sistematis, akan diuji secara empiris. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang menggunakan pendekatan survei.

Menurut Sugiyono (2019: 13) menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi mengenai populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, karena data penelitian yang digunakan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2014: 7).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2014: 38) menyatakan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yang sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pajak Daerah dan Utang Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”, tiga variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono,

2019: 69). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel independen adalah Pajak Daerah (X_1) dan Utang Pemerintah Daerah (X_2).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019: 67). Yang menjadi bagian dari variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Guna memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan mengumpulkan data, masing-masing variabel penelitian diterjemahkan atau dijabarkan kedalam indikator-indikator operasional yang mengarahkan tersusunnya alat ukur penelitian. Berdasarkan teori, konsep, proporsi dan asumsi mengenai variabel-variabel penelitian, operasionalisasi variabel-variabel penelitian dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pajak Daerah (X_1)	Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung	Rasio Pajak Daerah = $\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).

Utang Pemerintah Daerah (X ₂)	Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau Berdasarkan sebab lainnya yang sah (UU No.1 Tahun 2004).	Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran.	Rasio
---	---	--	-------

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi (UU No. 23 tahun 2014).	$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerinta Pusat,Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$	Rasio
---	--	--	-------

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) adalah penelitian melalui beberapa buku bacaan literatur atau keterangan-keterangan ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi dalam analisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Selain itu, teknik *Internet Research* digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh teori dan data yang diperoleh melalui *website* www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian yaitu jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021 yang diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021 yang diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3.2.3.2 Populasi Sasaran

Menurut Sugiyono (2019: 126) dalam penelitian kuantitatif, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012-2021. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan populasi penelitian:

Tabel 3. 2**Populasi Sasaran**

No.	Nama Kabupaten/Kota	No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Bandung	15.	Kabupaten Sumedang
2.	Kabupaten Bekasi	16.	Kabupaten Tasikmalaya
3.	Kabupaten Bogor	17.	Kota Bandung
4.	Kabupaten Ciamis	18.	Kota Bekasi
5.	Kabupaten Cianjur	19.	Kota Bogor
6.	Kabupaten Cirebon	20.	Kota Cirebon
7.	Kabupaten Garut	21.	Kota Depok
8.	Kabupaten Indramayu	22.	Kota Sukabumi
9.	Kabupaten Karawang	23.	Kota Tasikmalaya
10.	Kabupaten Kuningan	24.	Kota Cimahi
11.	Kabupaten Majalengka	25.	Kota Banjar
12.	Kabupaten Purwakarta	26.	Kabupaten Bandung Barat
13.	Kabupaten Subang	27.	Kabupaten Pangandaran
14.	Kabupaten Sukabumi		

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah kembali)

3.2.3.3 Penentuan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (Sugiyono, 2014: 81).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini sampel

yang digunakan adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pengambilan sampel dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hanya ada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdaftar secara resmi pada tahun 2012.
2. Kabupaten Pangandaran terdaftar resmi sebagai bagian dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2014 sehingga tidak ada data pada tahun 2012-2013.
3. Dilihat dari kelengkapan data, yaitu data dari populasi sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki data dalam menerima pinjaman daerah hanya 19 Kabupaten/Kota pada periode tahun 2012-2021.

Tabel 3. 3

Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota	No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Bandung	11.	Kabupaten Sukabumi
2.	Kabupaten Ciamis	12.	Kabupaten Sumedang
3.	Kabupaten Cianjur	13.	Kabupaten Tasikmalaya
4.	Kabupaten Cirebon	14.	Kota Cirebon
5.	Kabupaten Garut	15.	Kota Sukabumi
6.	Kabupaten Indramayu	16.	Kota Tasikmalaya
7.	Kabupaten Kuningan	17.	Kota Cimahi
8.	Kabupaten Majalengka	18.	Kota Banjar
9.	Kabupaten Purwakarta	19.	Kabupten Bandung Barat
10.	Kabupaten Subang		

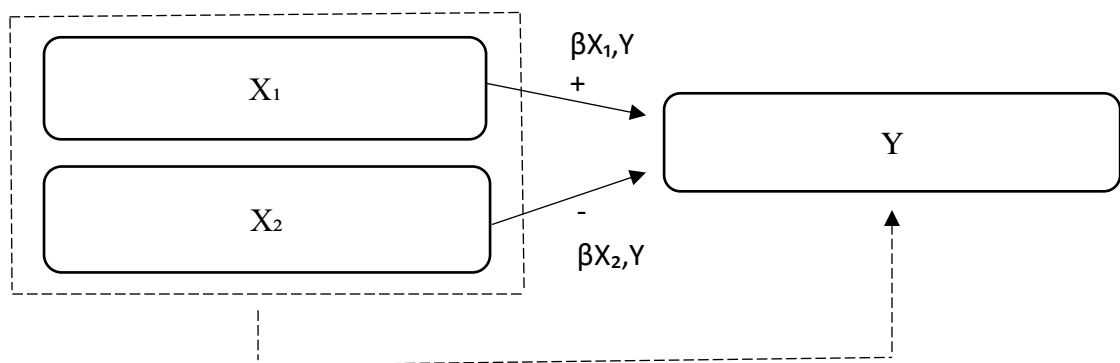
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah kembali)

3.2.4 Model Penelitian

Model penelitian atau paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui

penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. (Sugiyono, 2019: 72).

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah paradigma dengan tiga variabel yaitu Pajak Daerah (X_1), Utang Pemerintah Daerah (X_2), terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 2

Paradigma Penelitian

Keterangan:

X_1 : Pajak Daerah

X_2 : Utang Pemerintah Daerah

Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

—→ : Berpengaruh secara parsial

-----→ : Berpengaruh secara simultan

3.2.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan program bantuan komputer yaitu SPSS versi 25.

3.2.5.2 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019: 206), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga untuk menentukan keepatan model perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas dan heterokedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016: 154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data sampel berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data sampel tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai *tolerance* dan

variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF 10.

- a. Jika nilai $VIF > 10$, maka didalam data tersebut terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas menurut Ghozali (2013: 142) adalah dengan menggunakan Uji Gletser. Uji Gletser dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil Probabilitas dikatakan signifikan apabila nilai signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%.

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dalam model regresi terdapat masalah heterokedastisitas.
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dalam model regresi tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara satu periode (t) dengan periode sebelumnya (t_{-1}). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section*. Uji autokorelasi dapat diuji dengan metode Durbin Watson dimana jika $du < DW\text{-sat} < 4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi. Namun menurut Nachrowi dan Mahyus Eka (2016), uji autokorelasi hanya memiliki satu nilai dalam 1 model regresi. Jika dalam satu model ada beberapa nilai (hasil) uji autokorelasi maka uji tersebut tidak lagi sah, sehingga dalam data panel uji autokorelasi ini tidak diwajibkan, karena tidak memiliki makna.

3.2.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel independen, digunakan persamaan regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018: 95).

Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Utang Pemerintah Daerah secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- α = Konstanta
- β = Slope atau koefisien regresi
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Utang Pemerintah Daerah
- e = Error

3.2.5.4 Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018: 97) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kebaikan suatu model, serta melihat kemampuan model untuk menerangkan seberapa besar variabel independen menerangkan variabel dependen. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung koefisien determinasi:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

Berikut ini merupakan kriteria yang digunakan untuk menganalisis koefisien determinasi:

- a. Jika Kd mendekati nol, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen rendah.
- b. Jika Kd mendekati satu, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tinggi.

3.2.5.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak ada pengaruh kualitas pelayanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian, secara simultan dan parsial. Uji hipotesis untuk korelasi ini dirumuskan dengan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$$

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel Pajak Daerah (X_1) dan Utang Pemerintah Daerah (X_2) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

$$H_0 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$$

terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel Pajak Daerah (X_1) dan Utang Pemerintah Daerah (X_2) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Pajak Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

$$H_0 : \beta_1 \neq 0$$

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Pajak Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Utang Pemerintah Daerah (X_2) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

$$H_0 : \beta_2 \neq 0$$

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Utang Pemerintah Daerah (X_2) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).